

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Suradi (2013) kebutuhan akan bertahan hidup menjadikan motivasi seorang manusia berperilaku baik atau tidak baik. Jika terdapat sesuatu yang mengancam pada kelangsungan hidup akan menyebabkan seseorang untuk memilih cara bertahan hidup yang jujur atau tidak jujur. Cara-cara yang tidak jujur akan dibenarkan ketika persaingan mulai keras dan membahayakan. Persaingan yang ketat dalam bertahan hidup mendorong seseorang untuk berperilaku tidak jujur dalam segala aspek bidang.

Tindakan kecurangan atau *fraud* menjadi masalah yang harus dilawan dalam sektor swasta maupun publik. Menurut Bologne *Fraud* merupakan kejahatan untuk memperoleh keuntungan kepada pelaku dan memberikan kerugian secara finansial kepada korban. (Dewayani, 2015)

Ada beberapa faktor yang mendorong manusia untuk melakukan *fraud*. Teori *Fraud Triangle* oleh Cressey (1953) mengemukakan 3 faktor yaitu tekanan, peluang atau kesempatan. Tekanan yang paling kuat yang dihadapi pelaku kecurangan yaitu tekanan finansial (Isgiyata dan Budiyoni, 2018)

Kasus terjadinya *fraud* dalam skala internasional tidak terlepas dari kasus Enron pada tahun 2001. Enron merupakan perusahaan energi yang dalam waktu 15 tahun sukses menjadi perusahaan terbesar ke-7 di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut memiliki 21 ribu karyawan di lebih 40 negara. Melalui laporan keuangan perusahaan yang telah dimanipulasi, Enron sukses mendapatkan geyuran dana segar dari para investor. Tapi sayang, kesuksesan perusahaan energi raksasa itu akhirnya ambruk karena serangkaian penipuan di pihak manajemen. (*liputan6.com, 3 April 2014 diakses 16 Juli 2019*)

Dalam kasus Bank Century terdapat penyalahgunaan wewenang jabatan yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp.7 Triliun lebih. Dana yang dikeluarkan untuk *bail out* Bank Century awalnya 600 – 800 Milyar membengkak hingga menjadi 6,7 Triliun. Selisih angka yang tidak masuk akal yang telah diperhitungkan oleh orang-orang yang berpendidikan. Meskipun KPK telah

menetapkan beberapa tersangka sampai saat ini kasusnya belum terselesaikan oleh KPK (*Bbc.com, 16 Juli 2014 diakses 16 Juli 2019*).

Kasus tindakan kecurangan di sektor perbankan lainnya yaitu kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebanyak Rp. 3,7 Triliun. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) selaku Ketua BPPN sebagai tersangka. Ia diduga melakukan korupsi atas penerbitan SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004. Atas penerbitan SKL itu kerugian negara sekurang-kurangnya mencapai Rp3,7 triliun. (*Tirto.id, 2 Mei 2017 diakses 16 Juli 2019*).

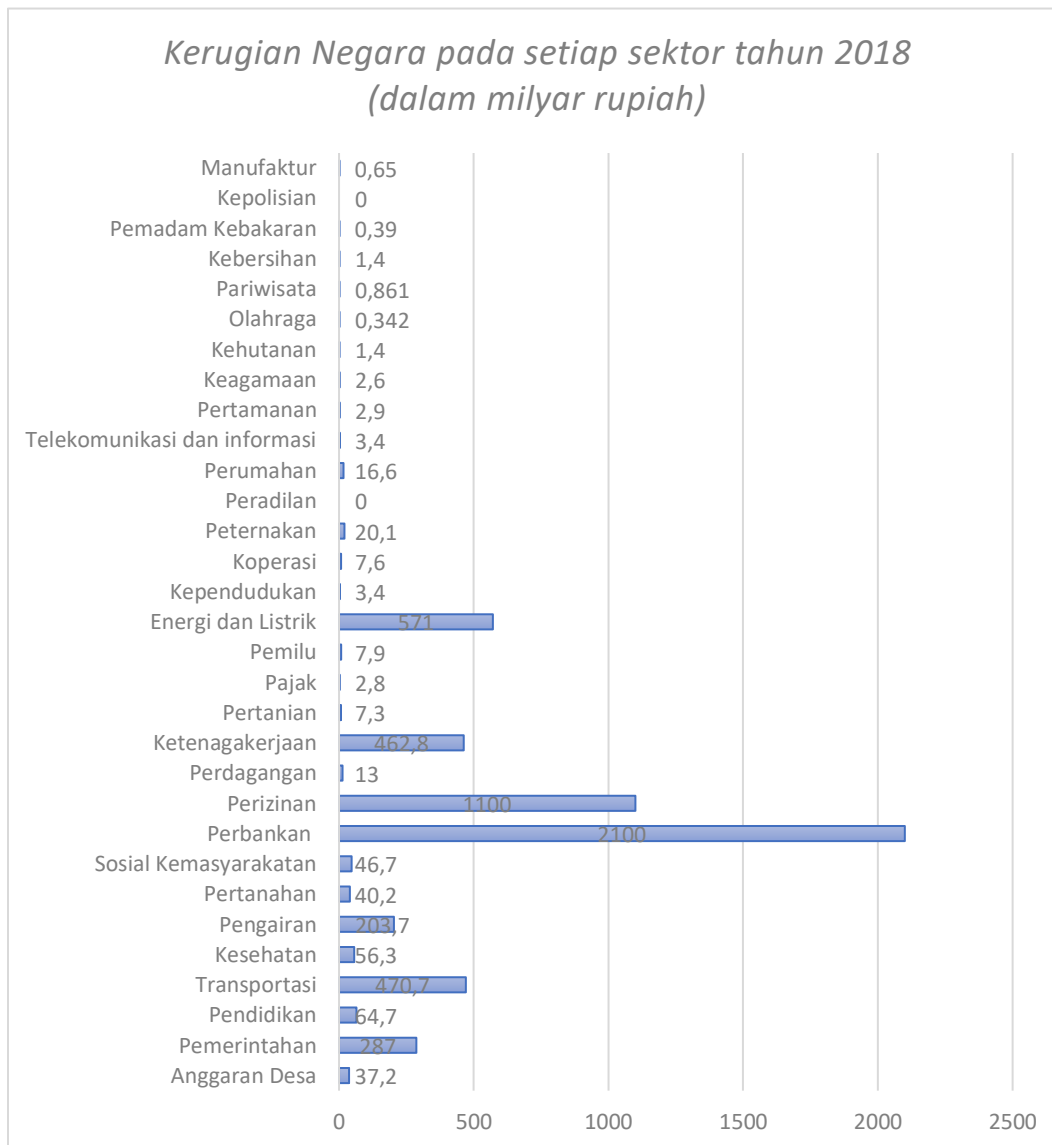
Tahun lalu tepatnya 2018, negara mengalami kerugian Rp. 1,8 Triliun dari kasus pembobolan Bank Mandiri oleh PT TAB. Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati total kerugian negara dari kasus pembobolan Bank Mandiri oleh PT Tirta Amarta Bottling Company (TAB) sebesar Rp 1,8 triliun. Kasus ini bermula pada 2015 lalu, di mana TAB diduga merekrut persyaratan sebagai debitur Bank Mandiri Commercial Banking Center Bandung I dan turut melibatkan sejumlah karyawan Bank Mandiri. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung juga sudah menahan Direktur PT TAB Rony Tedy. Rony berperan mengajukan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri dengan salah satu syaratnya menjaminkan sejumlah aset perusahaan serta laporan keuangan perusahaan yang diklaim positif. (*kompas.com. 21 Mei 2018 diakses 8 Oktober 2019*)

Pada tahun 2019, Kejaksaan Tinggi (Kejati), Jawa Tengah, menetapkan dua orang karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Purbalingga menjadi tersangka kasus pembobolan kredit karyawan di BRI. Senin (1/7/2019). Diketahui kedua karyawan tersebut bernama ES, dan IS. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Kusnin menuturkan, kedua tersangka tersebut mempunyai peran meloloskan kredit yang pada nyatanya fiktif. Besaran kredit yang dikucurkan sekitar Rp 28 miliar. (*kompas.com. 2 Juni 2019 diakses 8 oktober 2019*)

BRI adalah salah satu bank tertua milik pemerintah dan merupakan bank terbesar se-Indonesia. Memiliki sebanyak 60.553 karyawan (tahun 2018). BRI juga memiliki banyak unit yang tersebar di daerah kecamatan sehingga aksesnya dapat dijangkau oleh masyarakat yang jauh dari kota. Sebagai bank terbesar se-Indonesia seharusnya sudah memiliki sistem pengendalian internal yang kuat tetapi pada faktanya masih ada kasus kecurangan yang dilakukan oleh karyawannya. Maka dari itu subjek penelitian ini dilakukan pada Bank BRI khususnya di Kabupaten Subang.

Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tahun 2011 tentang Penerapan Sistem Anti *Fraud* bagi Bank Umum. Bank umum di Indonesia diarahkan untuk melakukan upaya memberantas korupsi diperbankan, tidak hanya upaya pencegahannya tetapi juga dalam upaya mendeteksi dan melakukan investigasi serta upaya memperbaiki sistem anti *fraud* yang dimiliki perusahaan.

Menurut data yang dihimpun oleh Indonesian *Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2018 Indonesia mendapat peringkat ke 89 dari 180 negara berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Indonesia mendapatkan nilai sebesar 38 dari 100, semakin kecil angkanya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Pada tahun 2017, Indonesia mendapatkan posisi ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK tidak memengaruhi penegakan hukum dalam mencegah kasus korupsi menjadi maksimal meskipun dari segi posisi meningkat. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi para penegak hukum. Perlu adanya strategi dalam memberantas korupsi ICW melakukan pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan sektor yang rawan dikorupsi. Pemetaan sektor yang rawan dikorupsi dapat digunakan sebagai upaya untuk merancang aksi pencegahan. Berikut hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada data di bawah ini.



Sumber: Laporan Tren Korupsi tahun 2018 oleh ICW

Dari data di atas kita dapat melihat fakta bahwa korupsi pada sektor perbankan merupakan tingkat korupsi dengan nilai kerugian negara yang tertinggi yaitu 2.100 Milyar atau senilai 2,1 Triliun.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* disajikan dalam laporan tahunan yang berjudul “*REPORT TO THE NATIONS : 2018 GLOBAL STUDY ON OCCUPATIONAL FRAUD AND ABUSE*”

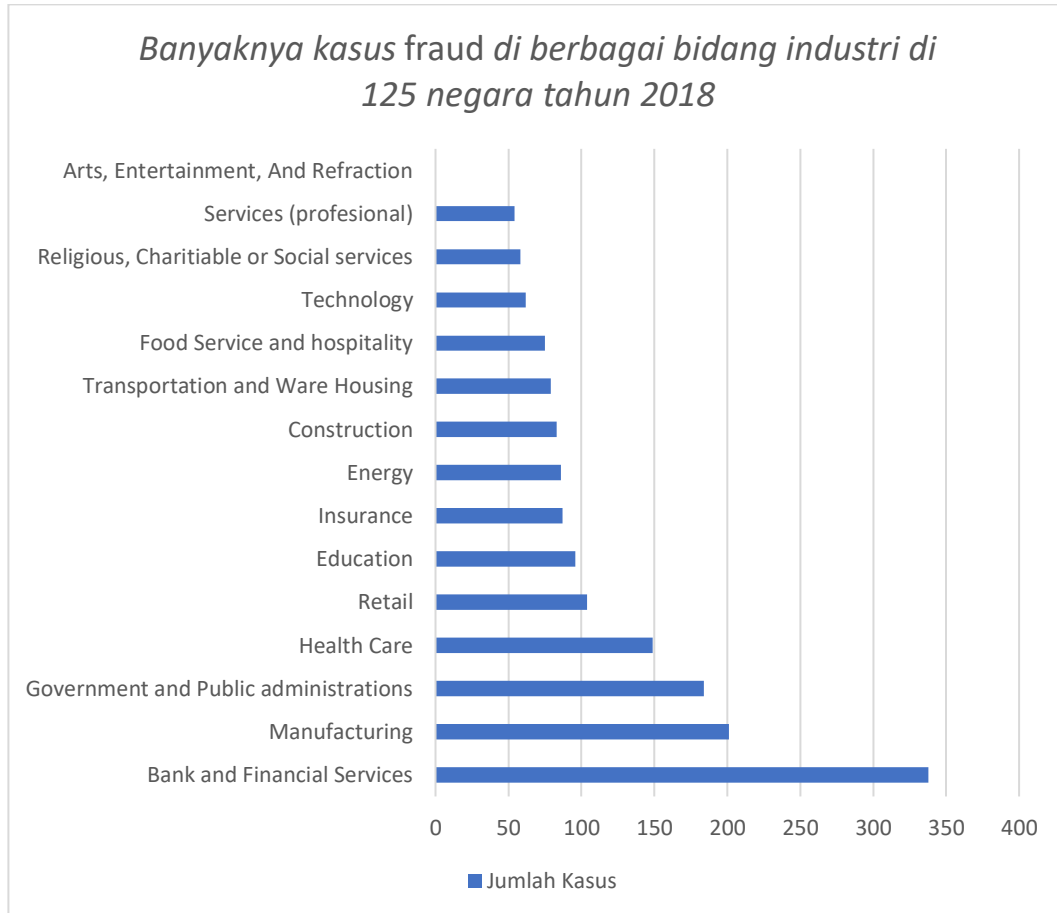
yaitu laporan yang berisi tentang kecurangan dan penyalahgunaan pekerjaan meliputi

Angger Dhimas Anggoro, 2019

PENGARUH KARAKTERISTIK PERSONAL, MORALITAS INDIVIDU, DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECENDERUNGAN FRAUD (Studi pada Bank X di Kabupaten Subang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

125 negara di dunia. Pada laporannya, sektor perbankan dan jasa keuangan menduduki peringkat pertama dengan jumlah kasus sebanyak 338. Berikut diagram banyaknya kasus fraud di berbagai bidang industri di 125 negara.



Sumber: *The Association of Certified Fraud Examiners*

Banyaknya kasus *fraud* yang muncul di berbagai negara dan dalam negeri menjadi persoalan yang sangat serius. *Fraud* dapat menurunkan tingkat kepercayaan antara individu terhadap individu lainnya. Sebagai contoh hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau masyarakat dengan bank. Adanya *fraud* atau korupsi membuat masyarakat menjadi kurang percaya terhadap pemerintah.

Boyle, DeZoort, & Hermanson (2015) dan Gonzalez & Hoffman (2018) mendefinisikan keterkaitan antara principal dan agen dalam mendeteksi *fraud*. Teori ini berfungsi untuk menyelesaikan *agency problems*. *Agency problems* adalah masalah

dalam hubungan keagenan antara principal dan agen yang berbeda. Teori agensi tersusun dari tiga asumsi yaitu *self interest* (mementingkan diri sendiri), *bounded rationality* (rasionalitas yang terbatas), dan *risk averse* (menghindari risiko). (Wijayanti dan Hanafi, 2018).

Menurut Jack Bologna (1995) mengatakan, akar penyebab *Fraud* ada empat: *Greed* (Rakus/Serakah), *Opportunity* (Peluang), *Need* (Kebutuhan), dan *Exposes* (Hukuman yang rendah). Sikap rakus dan serakah adalah pusat dari keempat akar penyebab korupsi (*Greed*). Sistem yang buruk belum tentu mendorong seseorang melakukan tindakan *fraud*. Kebutuhan yang mendesak juga belum tentu membuat orang melakukan tindakan *fraud*. Hukuman yang rendah bagi pelaku tindakan *fraud* tidak serta merta membuat orang lain juga ikut melakukan tindakan *fraud*. Secara sederhana, perilaku koruptif bermula dari sikap serakah yang akut (Dewayani, 2015). *Greed* dan *Need* bersifat pribadi dalam seseorang dan akan sulit dihilangkan sehingga cenderung melanggar aturan, sedangkan *Opportunity* dan *Exposes* berkaitan dengan korban yang dirugikan karena tindakan *fraud* (Wijayanti & Hanafi, 2018).

Menurut T. Afkar, dkk.(2016) dalam penelitannya yang berjudul desain anti korupsi. Ada 2 faktor penyebab seseorang melakukan korupsi yaitu faktor internal dan eksternal. Ada dua aspek dalam faktor internal yaitu aspek perilaku individu dan aspek sosial. Sifat rakus manusia, moral yang kurang, dan gaya hidup yang konsumtif merupakan perilaku individu yang menjadi penyebab seseorang melakukan korupsi. Sedangkan aspek sosial, penyebab seseorang melakukan korupsi dikarenakan dorongan dari keluarga dan mengalahkan sifat baik individunya sendiri. Lingkungan yang seharusnya mendorong untuk melakukan hal baik malah mengajarkan yang tidak baik dan bukan memberikan hukuman atau nasihat ketika seseorang menyalahgunakan wewenang jabatan. Faktor penyebab seseorang korupsi lainnya yaitu faktor eksternal. Aspek dalam faktor eksternal yaitu 1) Sikap masyarakat terhadap korupsi. Kurangnya kesadaran masyarakat akan keikutsertaan dalam pencegahan korupsi menjadi penyebab seseorang melakukan korupsi.2) Aspek ekonomi. Pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan membuat seseorang terpaksa melakukan tindak korupsi. 3)

Aspek politis. Dengan pengaruhnya seseorang dalam dunia politik ia dapat mengendalikan sebuah kontrol dalam masyarakat. Meraih dan mempertahankan kekuasaan menjadi alasan mengapa seseorang melakukan tindak korupsi. 4)Aspek organisasi. Faktor-faktor yang melemahkan fungsi organisasi dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi.

Dalam penelitian *fraud* di Indonesia yang dilakukan oleh ACFE Indonesia 2016 menyatakan bahwa usia yang paling rawan melakukan korupsi yaitu usia 36-45 tahun. Hal ini disebabkan karena usia tersebut merupakan usia paling produktif dan biasanya menduduki posisi puncak manajemen. Dalam penelitian ini juga menyebutkan jenis kelamin yang paling cenderung melakukan korupsi yaitu berjenis kelamin pria sebesar 92%. Tingkat pendidikan para pelaku paling banyak yaitu tingkat Sarjana dan Magister dengan masa bekerja lebih dari 10 tahun. Faktor utama seseorang melakukan korupsi yaitu keinginan hidup bermewah-mewahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Hanafi (2018) pada pemerintahan desa dengan menguji pengaruh karakteristik personal yang diprosikan dengan usia, jenis kelamin, pengalaman kerja dan tingkat pendidikan terhadap kecenderungan *fraud*. Hasil penelitian tersebut menyebutkan hanya jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang tidak berpengaruh (secara parsial), hal ini disebabkan oleh pemilihan sampel yang didominasi laki-laki dan berpendidikan SMA menjadikan penelitian ini tidak representatif. Kelemahan penelitian ini yaitu sampel yang sedikit dan tidak beragam yaitu 20 orang kepala desa dan 20 orang bendahara desa sehingga tidak dapat direpresentasikan perbedaan proporsi di setiap proksinya.

Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan variabel karakteristik personal yang diprosikan dengan usia, jenis kelamin, pengalaman bekerja dan tingkat pendidikan. Dengan perbedaan pada subjek penelitiannya yaitu pada pegawai Bank BRI di Kab. Subang yang berjumlah 74 sampel penelitian sehingga diharapkan dapat menghasilkan hasil yang berbeda.

Faktor penyebab seseorang melakukan *fraud* yaitu salah satunya faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat pada perilaku individu tersebut. Dalam

penelitian ini menggunakan variabel moralitas individu bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya kecenderungan *fraud*.

Moralitas individu atau bisa disebut moral yang dimiliki seseorang dapat diukur menggunakan indikator *Multidimensional Ethics Scale* (MES). MES secara spesifik mengidentifikasi rasionalisasi dibalik alasan moral dan mengapa individu percaya bahwa suatu tindakan adalah etis. Teori ini dikemukakan oleh Reidenbach and Robin pada tahun 1988 (McMahon & Harvey, 2007)

Adapun beberapa penelitian yang mengukur moralitas seseorang antara lain yaitu (Wahyuni, 2017), (Santoso, 2015), (Puspasari & Suwardi, 2012) Rahimah, *et al.* (2018); Nugroho, (2017). Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas individu memiliki pengaruh pada kecenderungan *fraud*.

Faktor lainnya yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan *fraud* yaitu salah satunya faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari pengaruh lingkungan kerja individu tersebut. Dalam meminimalisasi tindak kecurangan dalam perusahaan perlu adanya sistem pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang dilakukan oleh sebuah perusahaan agar perusahaan berjalan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Jika sistem pengendalian internal suatu perusahaan itu lemah maka peluang kecurangannya akan besar tetapi jika sistem pengendalian internalnya kuat maka peluang kecurangannya dapat diperkecil.

Sistem pengendalian internal memiliki lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Elemen-elemen tersebut membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wilopo, (2006) menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perilaku tidak etis dan niat untuk melakukan kecurangan akuntansi. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Mulia *et al.*, (2017) menyatakan bahwa efektifitas pengendalian internal dapat mencegah terjadinya kecurangan. Dan beberapa penelitian serupa yang menggunakan

variabel pengendalian internal antara lain yaitu Fauwzi, (2011); Adelin, (2013); Nisak *et al.*, (2013); Artini, *et al.*, (2014); Sari, (2017); Wahyuni, (2017); Yuniarti, (2017); Wijayanti & Hanafi, (2018).

Salah satu faktor terjadinya *fraud* yaitu sikap masyarakat yang masih kurang sadar terhadap pentingnya pencegahan *fraud*. Peran masyarakat dalam kehidupan kewarganegaraan yaitu menjadi pengawas terhadap jalannya pemerintahan. Segala bentuk aspirasi akan memengaruhi peraturan perundang-undangan. Jika hukuman kepada pelaku *fraud* atau koruptor yang diberikan rendah maka tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelakunya maupun pelajaran bagi kepada semua orang. Dengan adanya penelitian ini yaitu sebagai bentuk kesadaran terhadap korupsi dan juga sebagai bentuk partisipasi dalam pencegahan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini diberi judul **”PENGARUH KARAKTERISTIK PERSONAL, MORALITAS INDIVIDU DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECENDERUNGAN *FRAUD*”** Penelitian ini dilakukan pada pegawai unit bank BRI di kabupaten subang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* ?
2. Apakah usia berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* ?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* ?
4. Apakah pengalaman bekerja berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* ?
5. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* ?
6. Apakah efektifitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* ?
7. Apakah Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan , Pengalaman Bekerja, Moralitas Individu. Efektivitas Pengendalian Internal memiliki pengaruh secara simultan terhadap kecenderungan *fraud* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.
2. Untuk mengetahui apakah usia berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.
3. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.
4. Untuk mengetahui apakah pengalaman bekerja berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.
5. Untuk mengetahui apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.
6. Untuk mengetahui apakah efektifitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud*.
7. Untuk mengetahui apakah Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan, Pengalaman Bekerja, Moralitas Individu, Efektivitas Pengendalian Internal memiliki pengaruh secara simultan terhadap kecenderungan *fraud* ?

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, banyak hal yang memengaruhi kecenderungan *fraud*. Peneliti membatasi masalah hanya pada karakteristik personal (usia, jenis kelamin, pengalaman bekerja, tingkat pendidikan), moralitas individu dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan *fraud*.

Penelitian ini juga hanya terfokus pada satu wilayah, sehingga tidak merepresentasikan seluruh pegawai bank se-Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* pada sektor perbankan.
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada bidang akuntansi forensik serta diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema *fraud*.
3. Sebagai sarana memperluas wawasan serta referensi bagi peneliti di masa yang akan datang

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan.

Untuk memberikan pandangan kepada pihak manajemen terkait tanggung jawabnya dalam menciptakan praktik *Good Corporate Governance*. Manajemen diharapkan dapat memberikan keputusan atau langkah yang tepat dalam melakukan pencegahan *fraud* dalam perusahaan bisnis manapun tidak hanya di sektor perbankan.

2. Bagi pemerintah.

Diharapkan penelitian ini menjadi solusi bagi pemerintah dalam pengambilan langkah mengatasi tindak pidana korupsi di sektor perbankan. Penelitian ini juga mendukung program pemerintah untuk melawan segala tindakan korupsi di segala sektor pemerintahan.

3. Bagi masyarakat.

Untuk memberi edukasi kepada masyarakat bahwa fenomena *fraud* yang sedang marak terjadi dan menjelaskan mengenai tahapan, cara mendeteksi dan mencegah *fraud* sedini mungkin.